

**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KELUARGA MISKIN TAHUN 2013 DI KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57a Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Bantuan Pemerintah)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh

RAJA MUHAMMAD IKHSAN

NIM. 110563201124

Pembimbing Utama : Rudi Subiyakto

Pembimbing Kedua : Dian Prima Safitri

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2015**

**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KELUARGA MISKIN TAHUN 2013 DI KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57a Tahun 2012
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah dan Bantuan Pemerintah)**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan untuk Kota Tanjungpinang berada pada urutan ke-2 dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepri dengan persentase kemiskinan sebesar 19,05% dari total penduduk (194.099 jiwa). Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program daerah yang salah satunya adalah bantuan sosial (bansos) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada keluarga miskin.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan program bansos UEP yang dilaksanakan oleh Dinsos Provinsi Kepri yang bekerja sama dengan Dinsosnaker Kota Tanjungpinang dalam proses pemberdayaan sosial keluarga miskin tahun 2013 di Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta teori Van Meter dan Van Horn yaitu *A Model of the Policy Implementation* (1975).

Peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan indikator-indikator dalam setiap dimensi yang diteliti, hal-hal yang sudah dilaksanakan secara maksimal antara lain: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan sudah tertuang dan sesuai dalam Renstra Dinsos Provinsi Kepri 2010-2015, kompetensi badan pelaksana kebijakan telah diamanatkan dalam peraturan daerah, adanya mekanisme pengawasan terhadap badan pelaksana, para pelaksana sudah bersikap responsif dan intensif dalam pelaksanaan program; sedangkan hal-hal yang belum dilaksanakan secara maksimal antara lain: SDM tidak semuanya dimanfaatkan, penempatan alokasi anggaran bansos UEP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak adanya *Standard Operating Procedures* (SOP).

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyarankan agar semua SDM dimanfaatkan, penganggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, program sebaiknya dilaksanakan di APBD-Murni, SOP program bansos UEP perlu dibuat, penerima bansos UEP keluarga miskin harus terdata di data PPLS, dan bansos UEP tidak perlu mempersyaratkan pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) di Kelurahan.

Kata Kunci : bantuan sosial, dinas sosial, pemberdayaan sosial, program penanggulangan kemiskinan, usaha ekonomi produktif.

**THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL ASSISTANCE OF
PRODUCTIVE ECONOMIC BUSINESS ENTITIES FOR POOR FAMILIES
IN TANJUNGPINANG IN 2013**

*(Study Of the Governor Regulation of Riau Islands Number 57a Year 2012
regarding the Budgeting Procedures, the Implementation and Administrations,
the Accountability and Reporting, along with the Monitoring and Evaluation of
Grants Expenditures and Government Aids)*

ABSTRACT

Poverty is a social-economic condition of a person or a group of people whose basic needs is unfulfilled to maintain and develop their dignified life. In 2012, the poverty level of Tanjungpinang city was ranked second out of the seven districts/cities in the Province of Riau Islands with the percentage of poverty 19,05% of 194.099 total population of Tanjungpinang. Poverty reduction efforts have been being carried out through various programs, one of which is the social assistance of productive economic business entities for poor families.

The purpose of this research is to perceive the implementation of the social assistance of productive economic business entities program conducted by Social Agency of the Riau Islands Provincial Government that cooperated with Social Agency of the Tanjungpinang City Government in the social empowerment process of poor families in Tanjungpinang in 2013. In this research, we use the descriptive-qualitative research method along with Van Meter and Van Horn's theory, that is A Model of the Policy Implementation (1975).

We conclude that based on the indicators in every dimensions studied, things that had been maximally carried out, among others the basic indicators and policy objectives already stated in The Strategic Plans of the Social Agency of Riau Islands 2010-2015, the competence of the policy executive body had been stated in provincial regulations, there are supervising mechanisms on the policy executive body, the implementers acted responsively and intensively in implementing the program; whereas things that had not been maximally carried out, among others all human resources had not yet been utilized, the budget placement of the social assistance of productive economic business entities not in accordance with the applied regulations, and there was no Standard Operating Procedures (SOP).

In connection with that matters, we suggest that all human resources should be utilized, the budget placement has to be in accordance with the applied regulations, the program should be done in first in the first semester of the year, SOP concerning the implementation social assistance of productive economic business entities has to be established, the recipients of the social assistance of productive economic business entities must be included in the list of poor families, and the social assistance of productive economic business entities does not require making the statement letter of entrepreneurship in the village.

Keywords : *poverty reduction program, productive economic business entities, social agency, social assistance, social empowerment.*

**IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KELUARGA MISKIN TAHUN 2013 DI KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57a Tahun 2012
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah dan Bantuan Pemerintah)**

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial RI 2011:5). Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan pelaksanaan yang tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Seperti halnya di Provinsi Kepulauan Riau (Prov. Kepri) , pengentasan kemiskinan juga merupakan salah satu tema utama pembangunan daerah. Dalam perkembangannya kemiskinan di Prov. Kepri mengalami siklus naik turun. Pada tahun 2008 kemiskinan di Prov. Kepri \pm 18,51%, kemudian turun menjadi 12,99% pada tahun 2011. Dengan demikian ada penurunan angka kemiskinan sekitar \pm 5,52%. Akan tetapi pada tahun 2012 kemiskinan di Prov. Kepri kembali meningkat sekitar \pm 4,05% yaitu menjadi \pm 17,04%. Berikut data kemiskinan Prov. Kepri Tahun 2012:

TABEL A.1 :
Jumlah Individu Miskin, Menurut Kabupaten Dan
Status Kesejahteraan Tahun 2012

Nama Kab/Kota	Jumlah Individu			
	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	TOTAL
KARIMUN	8.533	16.666	15.240	40.439
BINTAN	6.515	10.945	9.064	26.524
NATUNA	2.055	2.760	2.437	7.252
LINGGA	7.235	8.316	6.638	22.189
KEP. ANAMBAS	1.132	1.933	1.683	4.748
BATAM	39.539	68.384	61.617	169.540
TANJUNG PINANG	13.754	12.390	10.839	36.983
TOTAL	78.763	121.394	107.518	307.675

Sumber data : TNP2K Prov. Kepri

*Catatan :

Sangat Miskin : (kondisi kesejahteraan s.d. 10% terendah di Indonesia)

Miskin : (kondisi kesejahteraan 11% s.d 20% terendah di Indonesia)

Hampir Miskin : (kondisi kesejahteraan 21% s.d 30% terendah di Indonesia)

Berdasarkan tabel I.1, dapat dilihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebesar 17,04 % dari total penduduk Prov. Kepri tahun 2012 yaitu 1.805.089 jiwa dan Kota Tanjungpinang berada pada urutan ke - 2 (dua) dengan persentase kemiskinan tahun 2012 sebesar 19,05% dari total penduduk kota Tanjungpinang tahun 2012 yaitu 194.099 jiwa (Data BPS Prov. Kepri).

Dalam pengentasan kemiskinan pemerintah daerah yaitu Prov. Kepri dan Kota Tanjungpinang telah melaksanakan berbagai program seperti tawaran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari pengusaha

dan perbankan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atau bantuan langsung tunai (BLT), rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), program beras untuk rakyat miskin (Raskin), dan sebagainya. Akan tetapi, tawaran UMKM itu sulit diakses oleh masyarakat miskin, dan program lainnya hanya membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akan tetapi keberlangsungan kesejahteraan sosial masyarakat miskin tidak menjadi jaminan kedepannya.

Dalam kondisi seperti ini maka pemerintah Prov. Kepri dan Kota Tanjungpinang memandang perlu untuk dapat memberikan pola pelaksanaan program yang efektif dengan kemudahan akses modal usaha tanpa anggungan melalui pola pemberdayaan sosial yaitu pola pelaksanaan program bantuan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pola program pelaksanaan bantuan sosial UEP di Kota Tanjungpinang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Prov. Kepri (Dinsos Prov. Kepri) bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang didasari oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57a Tahun 2012, Pasal 1 angka 15 yang menyebutkan bahwa:

“Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Pelaksanaan program bantuan sosial UEP keluarga miskin dilaksanakan dengan memberikan bantuan uang sebesar Rp. 2 Juta per orang. Bantuan uang diberikan untuk dijadikan modal usaha pada sektor informal. Pelaksanaan program bansos UEP kepada keluarga miskin harus berdasarkan data kemiskinan yaitu Data Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dikoordinasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K) dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Kepri. Penggunaan data kemiskinan tersebut bertujuan agar program kemiskinan seperti bansos UEP dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, program bansos UEP yang diberikan kepada keluarga miskin sebagian besar tidak berdasarkan data PPLS, akan tetapi banyak bantuan diberikan kepada keluarga miskin hanya berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan setempat. Berdasarkan data penerima UEP yang didapat dari Dinsos Prov. Kepri, penerima program bantuan UEP pada tahun 2013 di Kota Tanjungpinang berjumlah 38 orang. Setelah melakukan tringulasi data dari data PPLS *by name by adres*, didapat bahwa hanya 11 orang atau 28,95% terdata dalam PPLS sedangkan 27 orang atau 71,05% tidak terdata dalam PPLS. Dari keterangan tersebut, pelaksanaan kebijakan bansos UEP belum sepenuhnya tepat sasaran. sehingga pemberdayaan sosial melalui program bansos UEP tidak dapat berjalan secara optimal. Para pelaksana kebijakan seharusnya memperhatikan data kemiskinan resmi yang telah dikeluarkan sehingga dalam pelaksanaannya, program tidak menyimpang atau tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan kebijakan.

Berdasarkan fenomena diatas, pola pemberdayaan sosial tersebut mendorong penulis mencoba untuk menelusuri dan meneliti jelas tentang pelaksanaan program bansos UEP bagi keluarga miskin tahun 2013 di Kota Tanjungpinang. Pemilihan Kota Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian dikarenakan kemudahan dalam mengakses data. Disamping itu, Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi berada pada posisi ke - 2 (dua) tingkat kemiskinan di Prov. Kepri, yang tentunya hal ini mendorong penulis untuk

menelusuri lebih jauh pelaksanaan program bantuan sosial UEP melalui Dinsos Prov. Kepri yang berkerja sama dengan Dinsosnaker Kota Tanjungpinang, dengan sebuah penelitian berjudul: IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELUARGA MISKIN TAHUN 2013 DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja hibah dan bantuan pemerintah).

B. Landasan Teoritis

1. Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan berbeda dengan keputusan. Kebijakan berasal dari kata "*Policy*", sedangkan keputusan bersal dari kata "*decision*". Dalam arti luas Thomas R Dye dalam Yudiantmaja (2013:30) mengemukakan Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah (*whatever government choose to do or not to do*).

Pendapat Dye tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah dan menyangkut segala sesuatu yang diputuskan untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah, yang menyangkut tugas dan fungsi pemerintah.

2. Implementasi

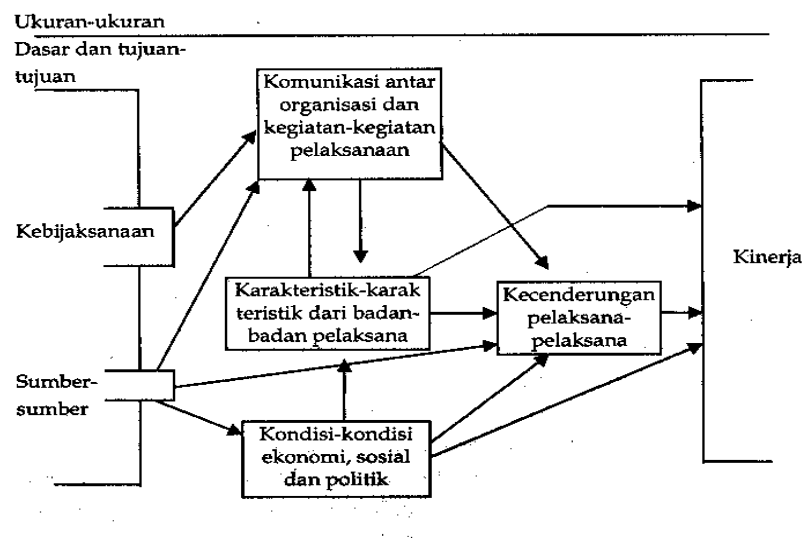
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) konsep implementasi kebijakan telah dibatasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukakan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok)

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Setelah melakukan pembatasan implementasi, Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:150) membedakan apa saja yang dimaksud implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan dampak kebijakan. Studi implementasi kebijakan tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari suatu kebijakan pemerintah akan tetapi studi implementasi mengukur dan menjelaskan apa saja pencapaian program dalam kebijakan tersebut. Pendekatan studi implementasi yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:160), disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975).

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:160) dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini :

GAMBAR B.1:
Skema Model Impelementasi Kebijakan



Sumber : Budi Winarno,

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik dan menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Berikut beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan Program Bantuan Sosial UEP Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 di Kota Tanjungpinang, yaitu:

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Indikatornya adalah tujuan kebijakan, sasaran strategis kebijakan dan strategi kebijakan dalam menjalankan Program bantuan sosial UEP Keluarga Miskin Tahun 2013 di Kota Tanjungpinang;

b. Sumber-sumber kebijakan

Indikatornya adalah sumber daya manusia (SDM), *Financial*/anggaran dan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan Program bantuan sosial UEP Keluarga Miskin Tahun 2013 di Kota Tanjungpinang;

c. Karakteristik badan-badan pelaksana

Indikatornya adalah kompetensi/kemampuan badan pelaksana, pengawasan badan pelaksana, *Standard Operating Procedures* (SOP) dan intervensi eksternal dalam menjalankan Program bantuan sosial UEP Keluarga Miskin Tahun 2013 di Kota Tanjungpinang;

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Indikatornya adalah komunikasi dan koordinasi terhadap instansi yang terkait sasaran dalam menjalankan Program bantuan sosial UEP Keluarga Miskin Tahun 2013 di Kota Tanjungpinang;

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Indikatornya adalah pemahaman, respon dan kemampuan para pelaksana dalam menjalankan Program bantuan sosial UEP Keluarga Miskin Tahun 2013 di Kota Tanjungpinang;

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Indikatornya adalah faktor pendorong eksternal dan kondisi lingkungan kondusif seperti lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam menjalankan Program bantuan sosial UEP Keluarga Miskin Tahun 2013 di Kota Tanjungpinang;

3. Program

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Angka 16 menyebutkan bahwa:

“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Jones (1991 : 296), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan ataupun sebagai pelaku program
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang bisa juga diidentifikasi melalui anggaran.

3. Program memiliki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

C. Hasil Penelitian

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

a. Indikator Tujuan Kebijakan

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi data bahwa tujuan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinsos Prov. Kepri sudah tertuang jelas dan sesuai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau No. 40 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 revisi tahun 2012, yaitu pada tujuan Dinsos Prov. Kepri butir 1 (satu) dan 7 (tujuh) yaitu :

- Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

b. Indikator Sasaran Strategis Kebijakan

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi data bahwa sasaran strategis kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinsos Prov. Kepri sudah tertuang jelas dan sesuai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau No. 40 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 revisi tahun 2012, yaitu pada sasaran strategis Dinsos Prov. Kepri butir 2 (dua) yaitu terberdayakannya fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya.

c. Indikator Strategi Kebijakan

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi data bahwa strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinsos Prov. Kepri sudah tertuang jelas dan sesuai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau No. 40 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 revisi tahun 2012, yaitu pada strategi Dinsos Prov. Kepri butir 1 (satu) yaitu Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

2. Sumber-sumber kebijakan

a. Indikator Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis bahwa SDM yang tersedia berjumlah 12 orang dan memiliki kapasitas dengan sertifikasi pekerja sosial. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, SDM Dinsosnaker Kota Tanjungpinang tidak dilibatkan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan program kebijakan karena komunikasi yang tidak hirarkis.

b. Indikator Anggaran (*Financial*)

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis bahwa anggaran yang tersedia berasal dari APBD-P Dinsos Prov. Kepri yaitu mencakup bantuan uang serta bimbingan teknis kepada penerima bantuan Sosial UEP. Akan tetapi dalam penganggaran bantuan uang, bantuan diletakan pada anggaran hibah bukan anggaran bansos. Penganggaran tersebut menyalahi ketentuan Pergub Kepri No. 57a Tahun 2012 pasal 27 huruf a bahwa anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

c. Indikator Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis bahwa waktu pelaksanaan program bantuan sosial UEP sekitar \pm 3 (tiga) bulan/lebih. Mengingat pelaksanaan bantuan sosial UEP ini dianggarkan di APBD-P, maka waktu pelaksanaan menjadi tidak kondusif sehingga pelaksanaan tidak optimal atau terburu-buru.

3. Karakteristik badan-badan pelaksana

a. Indikator Kompetensi Badan Pelaksana

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis bahwa kompetensi yang dimiliki badan-badan pelaksana kebijakan (Dinsos Prov. Kepri dan Dinsosnaker Kota Tanjungpinang) berdasarkan struktur organisasi dan tupoksi yang diamanatkan melalui peraturan daerah yaitu Perda Kepri No. 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Perda Kota Tanjungpinang No. 49 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang.

b. Indikator Pengawasan Badan Pelaksana

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis bahwa metode pengawasan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana (Dinsos Prov. Kepri) terdiri dari dua tahap yaitu pertama, pengawasan awal kepada penerima manfaat untuk melihat apakah bantuan tersalurkan dengan baik.

Kedua, pengawasan berjalan untuk melihat perkembangan manajemen usaha produktif yang dijalankan oleh penerima manfaat.

c. Indikator Standard Operating Procedures (SOP) Kebijakan

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis bahwa badan pelaksana (Dinsos Prov. Kepri) dalam melaksanakan program bansos UEP belum memiliki SOP sehingga pola-pola hubungan tidak terorganisir yang mengakibatkan pelaksanaan dapat menjadi salah prosedur, sasaran dan tidak tepat waktu.

d. Indikator Intervensi Eksternal Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis bahwa terdapat intervensi eksternal dalam pelaksanaan program, akan tetapi pelaksanaan tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

a. Indikator Komunikasi dan Koordinasi

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis bahwa komunikasi dan koordinasi tidak konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*). Pertama, komunikasi dan koordinasi badan pelaksana (Dinsosnaker Kota Tanjungpinang) tidak hiraikis. Kedua, Tidak

adanya komunikasi dan koordinasi pada tingkat kelurahan sebagai pihak yang mengeluarkan berkas persyaratan penerima bantuan.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

a. Indikator kognisi (pemahaman) para pelaksana

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, dapat dianalisis bahwa pemahaman sikap para pelaksana kebijakan adalah program disyaratkan perorang kepada kepala keluarga miskin sebagai wujud pemberdayaan sosial agar masyarakat miskin terhindar dari resiko sosial atau rentan kemiskinan.

b. Indikator respon para pelaksana

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, bahwa respon para pelaksana (Dinsos Prov. Kepri) merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Indikator intensitas (kemampuan) para pelaksana

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, bahwa pelaksana memiliki intensitas atau kemampuan dalam melaksanakan program sesuai tupoksi yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

a. Indikator faktor pendorong eksternal

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, bahwa lingkungan eksternal sebagian besar sangat mendukung dalam pelaksanaan program UEP keluarga miskin.

b. Indikator lingkungan kondusif

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan dan key informan, bahwa kondisi lingkungan seperti sosial, ekonomi dan politik sangat kondusif serta tidak ada masalah. Akan tetapi tingkat pemahaman pemangku kepentingan yakni RT/RW dan tingkat kelurahan masih kurang karena tidak adanya pemberitahuan secara resmi mengenai program tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa :

1) Tujuan kebijakan bansos UEP tertuang dalam Renstra Dinsos Prov. Kepri revisi Tahun 2012 pada tujuan Dinsos Prov. Kepri butir 1 (satu) dan 7 (tujuh) yaitu:

- Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

- 2) Sasaran strategis kebijakan bansos UEP tertuang dalam Renstra Dinsos Prov. Kepri revisi Tahun 2012 pada sasaran strategis Dinsos Prov. Kepri butir 2 (dua) yaitu Terberdayakannya fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya;
- 3) Strategi kebijakan tertuang dalam Renstra Dinsos Prov. Kepri revisi Tahun 2012 pada strategi Dinsos Prov. Kepri butir 1 (satu) yaitu Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Berdasarkan kesimpulan diatas, ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinsos Prov. Kepri sudah tertuang jelas dan sesuai dalam Surat Keputusan Kepala Dinsos Prov. Kepri No. 40 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Dinsos Prov. Kepri Tahun 2010-2015 revisi tahun 2012.

- b. Berdasarkan dimensi sumber-sumber kebijakan, dapat disimpulkan bahwa :
 - 1) SDM yang tersedia sudah memadai dan memiliki kapasitas sebagai pekerja peksos. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua SDM dimanfaatkan secara maksimal disebabkan oleh koordinasi yang tidak hirarkis di tingkat wilayah kerja Kota Tanjungpinang (Dinsosnaker Kota Tanjungpinang);
 - 2) Anggaran yang tersedia berasal dari APBD-P Dinsos Prov. Kepri yaitu mencakup bantuan sosial berupa uang dan bimbingan teknis kepada penerima bantuan. Anggaran bantuan uang dianggarkan pada mata anggaran belanja hibah di BPKKD sedangkan bimbingan teknis dianggarkan di DPA Dinsos Prov. Kepri. Proses penganggaran

bantuan uang bansos UEP pada mata anggaran hibah menyalahi Pergub Kepri No. 57a Tahun 2012 pasal 27 huruf a bahwa anggota/kelompok masyarakat yang menerima bansos meliputi: individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sesuai dengan pergub diatas, maka penganggaran bantuan uang bansos UEP harus diletakkan pada mata anggaran bansos, bukan mata anggaran hibah;

3) Waktu pelaksanaan program cukup lama yaitu sekitar \pm 3 (tiga) bulan/lebih. Mengingat pelaksanaan bantuan sosial UEP dianggarkan di APBD-P bukan di APBD-Murni, maka proses pelaksanaan menjadi tidak kondusif dan terburu-buru yang dapat berakibat gagalnya pelaksanaan program.

c. Berdasarkan dimensi karakteristik badan-badan pelaksana dapat disimpulkan bahwa:

1) Kompetensi badan pelaksana kebijakan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaran urusan wajib sosial pelayanan dasar yang telah diamanatkan melalui peraturan daerah yaitu Perda Kepri No. 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Perda Kota Tanjungpinang No. 49 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang.

2) Pengawasan badan pelaksana sudah dilaksanakan yaitu melalui dua tahap. Pertama, pengawasan awal kepada penerima manfaat untuk

melihat apakah bantuan tersalurkan dengan baik. Kedua, pengawasan berjalan untuk melihat perkembangan manajemen usaha produktif yang dijalankan oleh penerima manfaat;

- 3) Tidak terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam melaksanakan kebijakan, pelaksana kebijakan hanya mengandalkan pedoman penanggulangan kemiskinan dari Kementerian Sosial RI sehingga dalam pelaksanaannya, program dapat menjadi salah prosedur, salah sasaran dan tidak tepat waktu;
- 4) Terdapat intervensi eksternal dalam pelaksanaan kebijakan seperti intervensi dari pejabat, anggota dewan akan tetapi pelaksanaan tetap mengikuti pedoman penanggulangan kemiskinan dari Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh Dinsos Prov. Kepri.

- d. Berdasarkan dimensi komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa Komunikasi dan koordinasi tidak berjalan secara konsisten dan seragam di tingkat wilayah kerja Kota Tanjungpinang. Pertama, komunikasi dan koordinasi tidak hiraikis pada Dinsosnaker Kota Tanjungpinang. Kedua, Tidak adanya komunikasi dan koordinasi pada tingkat kelurahan sebagai pihak yang mengeluarkan berkas persyaratan yaitu SKTM dan SKU kepada calon penerima bantuan.
- e. Berdasarkan dimensi disposisi atau sikap para pelaksana, dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Para pelaksana memahami pelaksanaan program sesuai dengan pedoman yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program, penetapan penerima bantuan UEP keluarga miskin harus berdasarkan

data PPLS penduduk miskin bukan penduduk miskin yang menggunakan surat SKTM dari Kelurahan. Penggunaan Data PPLS bertujuan agar program menjadi tepat sasaran.

- b. Respon para pelaksana dalam melaksanakan program sesuai tanggungjawab, tugas pokok dan fungsinya melalui peraturan daerah;
 - c. Pelaksana memiliki intensitas atau kemampuan dalam melaksanakan program berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan melalui peraturan daerah.
- f. Berdasarkan dimensi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dapat disimpulkan bahwa :
- a. Lingkungan eksternal sebagian besar sangat mendukung program UEP keluarga miskin;
 - b. Kondisi lingkungan seperti sosial, ekonomi dan politik sangat kondusif dan tidak ada masalah.

2. Saran

- a. SDM perlu dimanfaatkan semua agar pelaksanaan dapat berjalan maksimal sesuai target kinerja yang direncanakan;
- b. Penganggaran berupa uang kepada penerima bansos UEP keluarga miskin harus sesuai dengan Pergub Kepri No. 57a tahun 2012 ;
- c. Program bansos UEP keluarga miskin sebaiknya dilaksanakan di APBD-Murni dari pada APBD-P karena pelaksanaannya memakan waktu \pm 3 bulan sehingga proses pelaksanaan lebih maksimal;
- d. Dinsos Prov. Kepri harus segera membuat SOP dalam pelaksanaan program bansos UEP keluarga miskin agar proses pelaksanaan sesuai prosedur, tepat sasaran dan tepat waktu;

- e. Komunikasi dan Koordinasi pelaksanaan program harus hirarkis, sehingga pelaksanaan program berjalan konsisten dan seragam;
- f. Pihak Kelurahan dan RT/RW harus diinformasikan melalui surat resmi agar mengetahui pelaksanaan program Bansos UEP keluarga Miskin;
- g. Penerima UEP keluarga miskin harus terdata dalam data PPLS bukan berdasarkan SKTM, sehingga pelaksanaan dapat menjadi tepat sasaran;
- h. Persyaratan membuat SKU di Kelurahan sebaiknya tidak perlu, karena konsep UEP adalah tidak hanya masyarakat yang memiliki usaha atau embrio usaha di sektor informal melainkan juga masyarakat miskin yang mempunyai keinginan untuk berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Andriani, Durri, dkk., 2013, *Metode Penelitian*, Banten: Universitas Terbuka.

N. Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*,
Yogyakarta: CAPS.

Yudiatmaja, Wayu Eko, 2012, *Negara, Masyarakat Sipil dan Kebijakan
Publik*, Yogyakarta: Capiya Publishing.

DOKUMEN DAN INTERNET :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57a Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Pemerintah.

Kementerian Sosial RI, 2010, *Rencana Strategis : Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2010-2014*, Jakarta.

Kementerian Sosial RI, 2011, *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan*, Jakarta.

Kementerian Sosial RI, 2011, *Pedoman Kelompok Usaha Bersama (Kube)*, Jakarta.

Kementerian Sosial RI, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Tahun 2013*, Jakarta.

Kementerian Sosial RI, 2014, *Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta.

Kementerian Sosial RI, 2014, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Raskin 2014*, Jakarta.

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2011, Tanjungpinang.

Agostino, 2006 Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn:

The Policy Implementation Process,

([http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-](http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/)

[kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-](http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/)

[implementation-process/](http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/), diakses 22 April 2014, 14:58).

Sasminendi, 2012 Bidang Promosi Kesehatan Dan Kesehatan Keluarga :

Program, ([http://sasminedi-kapus.blogspot.com/2012/10/program-](http://sasminedi-kapus.blogspot.com/2012/10/program-adalah.html)

[adalah.html](http://sasminedi-kapus.blogspot.com/2012/10/program-adalah.html), diakses 23 April 2014, 15:4